

3.1. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20. Analisis Pencapaian Sasaran 5.1

Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum.

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018(%)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	20	36,92	184,6	60	56,92	94,87
2	Persentase Penurunan Tindakan Kriminal	%
Rata-Rata Capaian Kinerja				

Sumber: Data diolah oleh Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat

- Nilai realisasi capaian **Persentase Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum** diperoleh dari 195 kasus yang ditangani bidang penegakan perda dan perkada namun yang sudah proses sidang hanya 10 kasus, sehingga ada 65 kasus yang masih pada proses BAP dan belum disidangkan sisanya pada proses SP.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terjadi penilaian 56,92% dengan skala penilaian rendah, hal ini disebabkan karena jumlah kasuspada 2019 sebesar 195 kasus sedangkan untuk proses persidangan hanya 10kasus,

sehingga ada 65 kasus yang masih pada proses BAP dan belum disidang dan sisanya pada proses SP. Hal ini terjadi pada jadwal sidang tindakan pidana ringan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang dijadwalkan satu kali dalam seminggu (pada hari Kamis). Jadwal sidang ini dapat mengganggu proesestindaklanjutan yang tidak sesuai dengan target.

Faktor penghambat pencapaian Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah adalah :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan satpol pp di seluruh kecamatan;
2. Minimnya jadwal persidangan tindak pidana ringan di Pengadilan;
3. Kekurangan PPNS dan personil lapangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, langkah antisipatif dan strategi yang akan diambil adalah sebagai berikut :

1. Langkah antisipatif
 - a. Tim Yustisi dan Non Yustisi akan bergerak lebih progresif dalam hal pengawasan dan penindakan;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan Satpol PP dan Damkar di setiap Kecamatan;
 - c. Berkoordinasi dengan pihak Pengadilan dalam hal penambahan jadwal TIPIRING;
 - d. Melakukan negosiasi kepada pihak terkait mengenai penambahan PPNS dan Personil Lapangan.

2. Strategi pemecahan masalah
 - a. Mengusulkan ditambahkan pada jadwal persidangan khusus tindak pidana ringan agar proses persidangan dapat terlaksana sesuai target;
 - b. Optimalisasi monitoring dan evaluasi data-data tempat usaha kost, barakdan rumah sewa terkait terindikasi adanya eks penutupan 3 (tiga) lokasi prostitusi yang masih berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. Revitalisasi database kawasan rawan pelanggaran perda, perkada, danrawan kebakaran sebagai upaya mewujudkan kondisi wilayah aman dan tenteram;

Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum.

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019(%)	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Toleransi (Inklusi Sosial)	%	0,70	0,77	110	0,72	0,77	106,94
2	Persentase Penurunan Tindakan Kriminal	%	10	11,03	110	12,5	6,58	52,64
Rata-Rata Capaian Kinerja				

- **Indeks Toleransi/ Inklusi Sosial dengan target pada tahun 2020 adalah 0,72 dan capaian 0,77.**

Strategi tercapainya Indeks Toleransi / Inklusi Sosial pada tahun 2020 adalah dengan melakukan survey terhadap sampel populasi yang mana dijadikan

sampel adalah anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan 2 (dua) variabel dan 4 (empat) indikator sebagai berikut :

1. Variabel Penerimaan Perbedaan Terhadap Budaya Sosial dengan indikator menerima kegiatan agama lain dan menerima tempat ibadah agama lain.

Adapun perhitungangan populasi yang dijadikan sampel adalah anggota FKUB berjumlah 17 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Indikator menerima kegiatan agama lain dan tempat ibadah lain

Nilai Interval = Nilai Bobot

Nilai Bobot	Keterangan
1	Tidak Setuju
2	Kurang Setuju
3	Setuju
4	Sangat Setuju

Rumus Indeks Toleransi /Inklusi Sosial :

Dimensi Indeks = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per item} \times \text{nilai penimbang (Bobot)}}{\text{Total item yang terisi}}$

Sampel	Nilai Bobot	Keterangan	Perhitungan (Bobot x Sampel)
5 org	4	Sangat Setuju	(5 org x 4) = 20
8 org	3	Setuju	(8 org x 3) = 24
4 org	2	Kurang Setuju	(4 org x 2) = 8
17 org			Total Nilai 52

$$\text{Dimensi Indeks} = \frac{52}{17} = 3,06$$

$$\text{Indeks Toleransi} = \frac{3,06}{4} = 0,77$$

Ket. Angka 4 adalah Jumlah Indikator

2. Variabel Inklusi terhadap Minoritas dengan indikator menerima kegiatan suku lain dan menerima pemimpin bersuku lain.

- Indikator menerima kegiatan suku lain dan menerima pemimpin bersuku lain

Nilai Interval = Nilai Bobot

Nilai Bobot	Keterangan
1	Tidak Setuju
2	Kurang Setuju
3	Setuju
4	Sangat Setuju

Rumus Indeks Toleransi /Inklusi Sosial :

Dimensi Indeks = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per item} \times \text{nilai penimbang (Bobot)}}{\text{Total item yang terisi}}$

Total item yang terisi

Sampel	Nilai Bobot	Keterangan	Perhitungan (Bobot x Sampel)
9 org	4	Sangat Setuju	(9 org x 4) = 36
9 org	3	Setuju	(9 org x 3) = 27
7 org	2	Kurang Setuju	(7 org x 2) = 14
25 org			Total Nilai 77

$$\text{Dimensi Indeks} = \frac{77}{25} = 3,08$$

$$\text{Indeks Toleransi} = \frac{3,08}{4} = 0,77$$

Ket. Angka 4 adalah Jumlah Indikator

- Nilai Total Indeks Toleransi / Inklusi Sosial sebagai berikut

$$\text{Indeks Toleransi} = \frac{0,77 \times 0,77}{2} = 0,77$$

Ket. Angka 2 adalah Jumlah Variabel

Berdasarkan hasil perhitungan indeks Toleransi menunjukkan bahwa secara garis besar tingkat Penerimaan atas Perbedaan Sosial Budaya dan Dukungan Sosial kepada Minoritas pada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sudah baik. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya ketidaksetujuan terhadap aktivitas dan perbedaan perlakuan terhadap suku/agama lain. Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki toleransi apabila suku dan agama lain melakukan kegiatan dan dibangun tempat ibadah agama lain di lingkungan sekitar.

- I. Analisis keberhasilan pada indeks toleransi ialah sebagai berikut:
 1. DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2020.
 2. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 300/31/Kesbang.I/2020 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.
 3. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor: 300/32/Kesbang.I/2020 Tentang Pembentukan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020.
- II. Strategi pencapaian toleransi di Kabupaten Kotawarin Barat dapat diuraikan sebagai berikut:
 1. Melaksanakan Kaji Banding Anggota Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Barat Ke Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jawa Timur yang di Fasilitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam rangka menambah Wawasan dan

saling tukar pengalaman dalam rangka menjaga, dan memelihara toleransi serta strategi Forum Pembauran Kebangsaan didalam memelihara toleransi dan mengatasi permasalahan di masyarakat terkait konflik horisontal yang mengancam kerukunan/toleransi di daerah masing-masing dan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan Pembauran Kebangsaan kepada Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Untuk mencapai keberhasilan toleransi kerukunan umat bergama dan antar umat beragama di Kabupaten Kotawaringin Barat yang rencana awal dilakukan Sosialisasi Lintas Etnis dan Agama tidak jadi dilaksanakan akibat Refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 untuk Bidang Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa melaksanakan Monitoring Umat Beragama dan Pendataan Rumah ibadah di 6 (enam) Kecamatan dan Pendataan Keberadaan Suku dan Etnis di 6 (enam) Kecamatan dalam rangka menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai masyarakat, ras, suku dan etnis serta agama.
3. Melaksanakan Rapat Pembinaan dan Audiensi Bupati Kotawaringin Barat dengan Anggota Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan tanggal 24 September 2020 dalam rangka membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban terhadap timbulnya ancaman ketidakstabilan daerah, serta menjaring aspirasi masyarakat melalui tokoh etnis dan agama yang tergabung dalam FPK dan FKUB.

4. Melaksanakan Rakor FKUB Tingkat Provinsi Kalteng Secara Virtual/Zoom Meeting di Ruang Rapat Setda Kab. Kobar, yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 29 september 2020 sebagai bahan laporan dan evaluasi Program-program Kegiatan FKUB se Kalimantan Tengah dalam Rangka meningkatkan Kerukunan Sesama Umat Beragama dan Antar Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Tengah serta mencari Solusi Bersama dalam menghadapi tantangan kedepan serta memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan Hubungan sesama instansi Pemerintah Daerah dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama.
5. Mengikuti rapat evaluasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mensukseskan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 dan menyampaikan program dan langkah-langkah FKUB dan FPK dalam penanganan pandemi Covid-19 yang tengah melanda khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Strategi pencapaian Indeks Toleransi /Inklusi Sosial ditengah pandemi Covid-19 yang mewabah akan tetapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap memerkuatkoordinasi dan konsolidasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai sebagai ujung tombak / garda terdepan dalam menjaga keharmonisan dan toleransi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dengan Badan Kesbangpol sebagai koordinator dan fasilitator.

Lampiran Foto-Foto:

**FOTO KEGIATAN KAJI BANDING KE PROVINSI JAWA TIMUR
DAN KABUPATEN SUMENEP**



RAKORDA FKUB TINGKAT PROV. KALTENG MELALUI ZOOM MEETING



RAPAT PEMBINAAN DAN AUDIENSI BUPATI BRSAMA FPK DAN FKUB



- Nilai realisasi capaian **Persentase Penurunan Tindak Kriminal** Tahun 2020 diperoleh dari 241 kasus dan sebagai angka pembanding kasus Tahun 2019 berjumlah 258 kasus.
- **Persentase Penurunan Tindak Kriminal dengan target pada Tahun 2020 adalah 12,5% dan realisasi 6,58% dengan capaian 52,64%**

$$\text{Rumus Perhitungan} = \frac{n_0 - n_1}{n_0} \times 100$$

Keterangan:

n_1 = Tahun akhir (2020)

n_0 = Tahun awal (2019)

Jumlah kasus kriminal tahun 2019 berjumlah 258 kasus

Jumlah kasus kriminal tahun 2020 berjumlah 241 kasus

$$\text{Rumus Perhitungan} = \frac{258 - 241}{258} \times 100$$

$$\text{Persentase} = 6,58 \%$$

- Analisis keberhasilan dalam penurunan tindak kriminal di Wilayah kabupaten Kotawaringin Barat dimana angka kriminalitas tahun 2019 sebanyak 258 kasus dan tahun 2020 sebanyak 241 kasus, terdapat selisih 17 kasus atau turun sebesar 6% (sumber Polres Kobar). Keberhasilan Polres Kobar menekan angka kriminalitas berkat kerja keras dari anggota dilapangan baik giat preventif yang diemban oleh Binmas dengan giat sambang, pembinaan masyarakat maupun deketsi dini dan penggalangan yang diemban oleh fungsi intelkam dan giat kepolisian oleh fungsi sabhara serta lalu lintas.

Selain itu tindak kriminal dapat ditekan karena adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Vertikal/Aparat Keamanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan komunikasi intensif melalui pelaksanaan rapat-rapat dalam mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan monitoring potensi konflik dan kegiatan patroli cipta kondisi di tempat-tempat yang dianggap rawan guna mencegah terjadinya tindak kriminal.

II. Strategi pencapaian keberhasilan dalam penurunan tindak kriminal di Wilayah kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

➤ Sinergitas / kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah yang beranggotakan Instansi Vertikal (Polres Kobar, Kodim 1014/Pbn, Lanud Iskandar P.Bun, Sub Denpom P. Bun, BIN, BAIS, Kejaksaan Kobar, Unit Kerja Kantor Imigrasi kelas II TPI Sampit dan SKPD terkait serta Camat se-Kobar yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan Patroli Cipta Kondisi di 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat, serta melakukan rapat-rapat untuk membahas perkembangan daerah terkini untuk memberikan masukan kepada Pimpinan Daerah.

➤ Melibatkan peran serta masyarakat dalam ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemerintah Daerah membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang beranggotakan masyarakat biasa yang terdiri dari tokoh agama/masyarakat, Ormas/LSM/, wartawan dalam rangka menjangkau, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi dari masyarakat mengenai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitarnya untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak keamanan agar setiap permasalahan dapat dideteksi dini sehingga tidak menjadi konflik yang lebih besar lagi.

- Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencegahan Konflik Sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) yang merupakan rencana kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh Instansi terkait (SOPD di Kab. Kobar dan Instansi Vertikal) dengan memetakan potensi konflik dalam rangka mencegah terjadinya konflik sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat. RAD yang disusun berdasarkan pada pemetaan potensi konflik, perkiraan situasi daerah dengan berdasarkan indeks kerawanan yang telah didata oleh Badan Kesbangpol maupun komunitas intelijen. Potensi konflik yang bersumber dari persoalan Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) maupun potensi penyebaran paham radikalisme/aksi terorisme.

Lampiran Foto-Foto:



(GIAT PATROLI CIPTA KONDISI DARI INSTANSI VERTIKAL)



(GIAT PATROLI CIPTA KONDISI DARI INSTANSI VERTIKAL)



(GIAT PATROLI CIPTA KONDISI DARI INSTANSI VERTIKAL)



(GIAT PATROLI CIPTA KONDISI DARI INSTANSI VERTIKAL)



(RAPAT TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT)



(RAPAT TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT)



(RAPAT KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL)



(RAPAT KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL)